

ANALISIS PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH INDUK KABUPATEN SOLOK

Fardian Hidayat¹, Melinda Noer², Adrimas³

^{1,2,3}Universitas Andalas

fardianhidayat@gmail.com, melindanoer@yahoo.com, adyulius@yahoo.co.id

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ekonomi dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebelum terjadinya pemekaran daerah dan setelah terjadinya pemekaran daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan Metode indeksasi digunakan untuk mendapatkan penilaian Kinerja Ekonomi, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur Kabupaten Solok sebelum dan sesudah pemekaran dengan mangacu kepada Studi evaluasi pemekaran daerah yang dilakukan oleh Bappenas dan UNDP tahun 2008. Hasil analisis menunjukkan bahwa Secara keseluruhan Indikator Kinerja Ekonomi (IKE), Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD), Indikator Kinerja Pelayan Publik (IKPD) dan Indikator Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (IKA) Kabupaten Solok setelah pemekaran lebih tinggi daripada sebelum pemekaran. Jadi bisa dikatakan pemekaran memberikan dampak positif terhadap Kabupaten Solok. Tapi jika dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok hanya lebih unggul di sisi Indikator Kinerja Ekonomi (IKE) dan Indeks Kinerja Aparatur (IKA). Sedangkan dari sisi Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD), Indikator Kinerja Pelayan Publik (IKPD) Kabupaten Solok Selatan lebih unggul dari Kabupaten Solok. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Solok hendaknya meningkatkan Peningkatan potensi daerah dan Peningkatan Porsi Belanja Langsung di Kabupaten Solok untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong peningkatan pembangunan sedangkan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan peningkatan kualitas aparatur

Kata Kunci : Pemekaran, kinerja, ekonomi, keuangan, pelayanan public, aparatur

ABSTRACT: This study aims to analyze the economic development and performance of the Regional Government of Solok Regency before the regional expansion and after the regional expansion. This study uses a descriptive approach and the indexation method is used to obtain an assessment of Economic Performance, Regional Government Financial Performance, Public Service Performance and Apparatus Performance. District of Solok before and after its division with reference to the evaluation study of regional expansion conducted by Bappenas and UNDP in 2008. The analysis shows that Overall Economic Performance Indicators (IKE), Regional Government Financial Performance Indicators (IKKPD), Public Servant Performance Indicators (IKPD)) and Performance Indicators of Regional Government Officials (IKA) of Solok Regency after the expansion was higher than before the division. So it can be said that the expansion has had a positive impact on Solok Regency. But when compared to South Solok Regency, Solok Regency is only superior in terms of Economic Performance Indicators (IKE) and Apparatus Performance Index (IKA). In terms of Regional

Government Financial Performance Indicators (IKKPD), Solok Selatan District Public Service Indicators (IKPD) are superior to Solok District. In this case, the Government of Solok Regency should increase the increase in regional potential and increase the Portion of Direct Spending in Solok Regency to improve public services and encourage increased development while efforts to improve the performance of local governments by improving the quality of the apparatus

Keywords: *expansion, performance, economy, finance, public service, apparatus*

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara. Tiebout dalam Adrimas (2012) dalam sebuah artikel yang berjudul "*A Pure Theory of Local Expenditure*" menyatakan bahwa pemekaran wilayah dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintahan daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengizinkan setiap individu masyarakatnya untuk mengekspresikan preferensinya untuk setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda dengan "*vote with their feet*".

Lebih lanjut Swianiewicz dalam Adrimas (2012) mengungkapkan bahwa komunitas lokal yang kecil lebih homogen dan lebih mudah untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan preferensi sebagian besar masyarakatnya. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam komunitas yang kecil memiliki peluang lebih besar. Selanjutnya, pemerintahan daerah yang kecil memiliki birokrasi yang rendah, misalnya fungsi administrasi. Dalam hal ini Hofman et al (2005) mengatakan pemekaran daerah itu dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada para konstituennya. Lahirya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong desentralisasi dan otonomi daerah telah menghadirkan pergeseran dan perubahan paradigma baru (*new paradigm shifting*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang ini juga telah memberikan peluang dalam pemekaran daerah baru sepanjang didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan untuk terselenggaranya otonomi daerah.

Tarigan (2006) menyebutkan bahwa pemekaran bisa dilakukan pada level provinsi maupun level yang lebih kecil, yaitu kabupaten dan kota. Pada level provinsi terdapat satu pola pemekaran, yaitu satu provinsi mekar menjadi satu provinsi baru dan satu provinsi induk. Sementara pada level kabupaten/kota terdiri dari 3 pola, yaitu : (1) Satu kabupaten menjadi satu kabupaten baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk, (2) Satu kabupaten menjadi satu kota baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk, (3) Satu kabupaten menjadi lebih dari satu kabupaten baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk.

Konsep Otonomi Daerah dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan ekonomi, demokratisasi ditingkat lokal, peningkatan pelayanan publik, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan menumbuhkan prakarsa serta kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Dari konsep otonomi daerah tersebut dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Semangat otonomi daerah melahirkan keinginan sebagian daerah untuk memekarkan diri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2007, pemerintahan provinsi telah bertambah dari 26 menjadi 33 (26,9 %), sedangkan pemerintah kabupaten/kota meningkat 45,2%, dari 303 menjadi 456. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah provinsi menjadi 34 dan jumlah kabupaten/kota menjadi 514.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan dan menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif pada daerah otonom hasil pemekaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan daerah serta percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan evaluasi daerah otonom hasil pemekaran.

Hasil studi evaluasi dampak pemekaran daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan, daerah pemekaran baru ternyata tidak berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan daerah induk. Pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru (DOB) lebih fluktuatif dibandingkan dengan daerah induk yang relatif stabil dan terus meningkat. Studi Bappenas dan UNDP ini, secara keseluruhan dilakukan di 6 provinsi dan 72 kabupaten/kota, meliputi 10 kabupaten induk, 10 kabupaten daerah otonom baru dan 6 kabupaten kontrol (Bappenas & UNDP, 2008). Sehingga berdasarkan hasil studi tersebut, Bappenas dan UNDP menyarankan pemerintah menghentikan sementara pemekaran daerah hingga dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap provinsi dan kabupaten hasil pemekaran dalam 10 tahun terakhir.

Kabupaten Solok adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dimekarkan menjadi 2 kabupaten yakni Kabupaten Solok (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Solok Selatan (DOB) berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Hampir 50% wilayah Kabupaten Solok dimekarkan menjadi Kabupaten Solok Selatan, dimana sebelum dimekarkan Kabupaten Solok mempunyai luas 7.084,20 km² sekarang menjadi 3.738,00 km² sementara luas Kabupaten Solok Selatan adalah 3.346,20 km² (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2019). Sebagai daerah yang telah dimekarkan, Kabupaten Solok tidak termasuk dalam daerah yang diteliti dalam studi evaluasi pemekaran daerah yang dilakukan Bappenas

Studi ini bertujuan menganalisis perkembangan ekonomi dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebelum terjadinya pemekaran daerah dan setelah terjadinya pemekaran daerah.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan Metode indeksasi digunakan untuk mendapatkan penilaian Kinerja Ekonomi, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,

Kinerja Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur Kabupaten Solok sebelum pemekaran (Tahun 1991 s/d 2003) dan sesudah pemekaran (Tahun 2006 s/d 2018) dengan mangacu kepada Studi evaluasi pemekaran daerah yang dilakukan oleh Bappenas dan UNDP tahun 2008. Data penelitian meliputi data sekunder yang meliputi laju pertumbuhan ekonomi non migas, pendapatan perkapita, angka kemiskinan, ketergantungan fiskal, kapasitas penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal pemerintah, daya tampung sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, kualitas infrastruktur, kualitas pendidikan aparatur, persentase aparatur pendidik dan persentase aparatur paramedis.

Analisis Kinerja Perekonomian Daerah

Untuk mengetahui secara umum perkembangan ekonomi daerah maka digunakan Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator berikut. Untuk kabupaten i di tahun t , indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut (Bappenas: 2008):

$$IKE_{i,t} = \frac{(ECGI_{i,t} + WELFI_{i,t} + ERRI_{i,t}) + (100 - POVEI_{i,t})}{4}$$

Dimana :

- $IKE_{i,t}$ = Indeks Kinerja Ekonomi
- $ECGI$ = Pertumbuhan PDRB non-migas (%)
- $WELFI$ = Laju PDRB per kapita (%)
- $ERRI$ = Rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi (%)
- $POVEI$ = Angka kemiskinan (%)

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengetahui secara komprehensif kinerja keuangan pemerintah, maka digunakan indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator berikut. Untuk kabupaten i di tahun t , indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut (Bappenas, 2008):

$$IKKPD_{i,t} = \frac{(100 - FIDI_{i,t}) + (FGII_{i,t} + FCAPEXI_{i,t} + FCEI_{i,t})}{4}$$

Dimana :

- $IKKPD_{i,t}$ = Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
- $FIDI$ = Ketergantungan Fiskal
(Indikator ini dirumuskan sebagai persentase dari Dana Alokasi Umum yang sudah dikurangi oleh Belanja Pegawai dalam total Pendapatan Anggaran Daerah)
- $FGII$ = Kapasitas Penciptaan Pendapatan
(dinyatakan sebagai persentase PAD dari PDRB kabupaten yang bersangkutan)
- $FCAPEXI$ = Proporsi Belanja Modal
(Indikator ini dirumuskan sebagai persentase dari Belanja Modal dalam total Belanja di anggaran daerah)
- $FCEI$ = Kontribusi Sektor Pemerintah
(Nilainya dinyatakan sebagai persentase Total Belanja)

Pemerintah dalam PDRB kabupaten yang bersangkutan)

Analisis Kinerja Pelayanan Publik

Untuk mengetahui secara komprehensif kinerja pelayanan publik ini, maka dibuat Indeks Pelayanan Publik (IKPP) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator berikut. Untuk kabupaten i di tahun t , indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut (Bappenas: 2008):

$$IKPP_{i,t} = \frac{(BEFI_{i,t} + (100 - BETI_{i,t}) + HEFI_{i,t} + (100 - HETI_{i,t}) + HFI_{i,t} + HOI_{i,t} + IQI_{i,t})}{7}$$

Dimana

IKPP $_{i,t}$ = Indeks Kinerja Pelayanan Publik kabupaten

BEFI = Jumlah siswa per sekolah (SD dan SMP)

BETI = Jumlah siswa per sekolah (SMA)

HEFI = Jumlah siswa per Guru (SD dan SMP)

HETI = Jumlah siswa per Guru (SMA)

HFI = Ketersediaan Fasilitas kesehatan

HOI = Ketersediaan tenaga kesehatan

IQI = Kualitas infrastruktur

(Persentase panjang jalan dengan kualitas baik terhadap keseluruhan panjang ruas jalan di kabupaten Solok)

Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Aparatur pemerintah menjadi hal pokok yang dievaluasi berkaitan dengan seberapa jauh ketersediaan aparatur yang dapat memenuhi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat indikator utama yang dapat dirumuskan dalam Indeks Kinerja Aparatur (IKA) yang menggabungkan masing-masing indikator sebelumnya, yang dirumuskan sebagai berikut (Bappenas: 2008) :

$$IKA_{i,t} = \frac{EQI_{i,t} + EFI_{i,t} + PPI_{i,t}}{3}$$

Dimana :

IKAi,t = Indeks Kinerja Aparatur Kabupaten

IQI = Kualitas Pendidikan Aparatur

(Indikator ini dinyatakan dalam persentase jumlah aparatur Yang berpendidikan minimal sarjana dalam jumlah total PNS)

EFI = Persentase Aparatur Pendidik

(Dinyatakan dalam jumlah aparatur yang berprofesi guru Dalam total jumlah aparatur PNS)

PPI = Persentase Aparatur Paramedis

(Dinyatakan dalam jumlah aparatur tenaga kesehatan dalam Total jumlah aparatur PNS)

C. HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian terhadap perkembangan perekonomian dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok. Indikator yang digunakan yaitu : Indikator Kinerja Ekonomi (IKE), Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD), Indikator Kinerja Pelayanan Publik

(IKPD) dan Indikator Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (IKA). Setiap indikator berisi beberapa angka indeks. Indeks tersebut pada intinya adalah rata-rata tertimbang dari seluruh indikator pada aspek yang bersangkutan

Analisis Indeks Kinerja Ekonomi

Indikator yang digunakan sebagai ukuran indeks kinerja ekonomi (IKE) adalah Pertumbuhan PDRB non-migas (ECGI), Laju PDRB per kapita (WELFI), Rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi (ESERI) dan Angka Kemiskinan (POVEI). Pertumbuhan ekonomi (ECGI) Kabupaten Solok sesudah pemekaran lebih tinggi dibandingkan sebelum pemekaran. Dengan rata-ratanya 5,80% sesudah pemekaran dan 4,48% sebelum pemekaran. Tapi rata-rata ECGI Kabupaten Solok sedikit lebih rendah dibandingkan Kabupaten Solok Selatan dengan rata-rata 5,84%. PDRB Per Kapita (WELFI) Kabupaten Solok cenderung meningkat secara signifikan setiap tahunnya baik sebelum pemekaran maupun setelah pemekaran, dari 2,06 juta pada tahun 1992 meningkat menjadi 3,16 juta pada tahun 2003. Pada tahun 1998 terjadi penurunan sebesar 3,64% dari 2,65 juta pada tahun 1997 menjadi 2,55 juta pada tahun 1998. Hal ini disebabkan oleh krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia pada tahun 1997/1998 (tabel 1). Selama tahun 2006 sampai 2018 PDRB perkapita Kabupaten Solok lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan. PDRB rata-rata Kabupaten Solok adalah 7,04 juta sedangkan Kabupaten Solok Selatan 5,07 juta. Perkembangan ekonomi Kabupaten Solok yang tinggi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan jumlah penduduk. Rasio PDRB Terhadap PDRB Provinsi (ERRI) Kabupaten Solok terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat bervariasi sebelum pemekaran dengan rata-rata 5,46%. Setelah pemekaran rasio PDRB Kabupaten Solok selalu meningkat dengan rasio rata-rata 5,54% (tabel 1). Sedangkan rasio PDRB Kabupaten Solok Selatan terhadap PDRB provinsi sebesar 1,68% (tabel 1). Kontribusi Kabupaten Solok 3 kali lipat dari pada Kabupaten Solok Selatan. Angka Kemiskinan (POVEI) Kabupaten Solok sebelum pemekaran dengan rata-rata 17,08% sedangkan setelah pemekaran angka kemiskinan Kabupaten Solok rata-rata 11,10% (tabel 16). Setelah pemekaran daerah, terjadi penurunan angka kemiskinan secara signifikan pada Kabupaten Solok. Hal ini mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan sudah berjalan dengan baik. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan Angka Kemiskinannya lebih rendah dari Kabupaten Solok dengan rata-rata 9,84% (tabel 1). Secara keseluruhan kinerja ekonomi (IKE) kedua daerah berfluktuasi. Sebelum pemekaran IKE Kabupaten Solok dengan rata-rata 23,87 lebih rendah dari setelah pemekaran IKE Kabupaten Solok rata-rata 26,82. IKE Kabupaten Solok rata-rata 26,82 lebih tinggi dari Kabupaten Solok Selatan rata-rata 25,69. Hal ini disebabkan tingginya rata-rata PDRB perkapita (WELFI) dan Kontribusi PDRB Kabupaten Solok terhadap Provinsi (ERRI). Dari sisi IKE pemekaran daerah berpengaruh positif bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Solok

Tabel 1 Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Tahun	Kab. Solok sebelum pemekaran					Tahun	Setelah Pemekaran									
							Kab. Solok					Kab. Solok Selatan				
	ECGI	WELFI	ERRI	POVEI	IKE		ECGI	WELFI	ERRI	POVEI	IKE	ECGI	WELFI	ERRI	POVEI	IKE
1991	6,73	1,96	5,60	17,35	24,23	2006	6,02	4,91	5,51	17,98	24,62	5,81	4,00	1,66	17,65	23,46
1992	6,50	2,06	5,50	17,30	24,19	2007	6,24	5,15	5,51	17,59	24,83	6,08	4,19	1,66	17,43	23,62
1993	6,95	2,17	5,45	17,24	24,33	2008	6,35	5,42	5,48	13,43	25,95	6,12	4,39	1,65	13,41	24,69
1994	6,71	2,28	5,41	17,19	24,30	2009	6,24	5,69	5,58	12,15	26,34	6,10	4,59	1,68	11,66	25,18
1995	7,28	2,41	5,33	17,13	24,47	2010	6,05	6,23	5,59	11,74	26,53	6,29	4,53	1,68	11,11	25,35
1996	8,50	2,56	5,36	17,08	24,84	2011	6,13	6,55	5,58	11,19	26,77	6,34	4,75	1,68	10,61	25,54
1997	4,83	2,65	5,34	17,03	23,95	2012	6,26	6,89	5,57	10,03	27,17	6,51	4,99	1,69	9,37	25,95
1998	-3,74	2,55	5,49	16,97	21,83	2013	5,27	7,19	5,53	10,26	26,93	6,13	5,10	1,69	8,12	26,20
1999	1,52	2,54	5,51	16,92	23,16	2014	5,79	7,55	5,53	9,53	27,33	5,90	5,30	1,69	7,33	26,39
2000	2,35	2,89	5,55	15,87	23,73	2015	5,43	7,90	5,52	10,00	27,21	5,35	5,48	1,68	7,52	26,25
2001	3,76	3,02	5,55	20,74	22,90	2016	5,30	8,26	5,52	9,32	27,44	5,11	5,66	1,68	7,35	26,28
2002	4,19	3,05	5,52	15,76	24,25	2017	5,33	8,65	5,53	9,04	27,62	5,15	5,85	1,68	7,18	26,38
2003	4,87	3,16	5,50	15,76	24,44	2018	5,23	9,04	5,53	8,86	27,74	5,04	6,04	1,68	7,04	26,43
Rata-rata	4,48	2,61	5,46	17,08	23,87	Rata-rata	5,80	7,04	5,54	11,10	26,82	5,84	5,07	1,68	9,84	25,69

Analisis Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam pembangunan di daerah secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauh mana pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diembankan pada pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal. Ketergantungan Fiskal (FIDI) digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan fiskalnya untuk membiayai pembangunan, baik dari alokasi dana perimbangan dari pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan fiskal Kabupaten Solok menurun setelah pemekaran daerah yaitu dari rata 30,06 menjadi 14,04 setelah pemekaran. Pada tahun 2018 ketergantungan fiskal daerah mekar cenderung menurun secara signifikan dan fluktuatif menjadi 21,91. Hal yang sama juga terjadi pada daerah induk, tahun 2006 ketergantungan fiskal daerah induk adalah 40,81 menurun secara fluktuatif dan signifikan hingga mencapai 6,53 pada tahun 2016. Secara keseluruhan ketergantungan fiskal daerah mekar lebih besar dibandingkan dengan daerah induk. Kabupaten Solok Selatan baru memulai tahapan pembangunan daerah karena baru mengalami pemekaran yang membutuhkan biaya cukup besar dari pemerintah pusat sedangkan sumber penerimaan daerah dari PAD belum digali secara optimal. Hal ini dikarenakan Kabupaten Solok Selatan masih dalam proses awal penataan daerah.

Kapasitas Penciptaan Pendapatan (FGII), Rasio PAD terhadap PDRB digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dari sisi pendapatan secara makro. Kapasitas Penciptaan Pendapatan (FGII) Kabupaten Solok pada tahun 2006-2018 fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya dari 0,88 pada tahun 2006 dan 0,53 pada tahun 2018. Kondisi serupa juga terjadi pada Kabupaten Solok Selatan selama periode 2006-2018 walaupun secara rata-rata lebih tinggi dari Kabupaten Solok, FGII juga Kabupaten Solok Selatan juga fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya dari 1,51

pada tahun 2006 dan 1,14 pada tahun 2018. Kapasitas penciptaan pendapatan Kabupaten Solok selama 2006-2018 dengan rata-rata 0,53% sedangkan Kabupaten Solok Selatan 0,89.

Proporsi Belanja Modal (FCAPEXI), Rasio belanja modal pemerintah terhadap total belanja (*capital expenditure*) mengukur seberapa jauh kebijakan pemerintah dalam penganggaran yang berorientasi kepada manfaat jangka panjang atau investasi. Pada Kabupaten Solok terjadinya peningkatan proporsi CAPEXI dari sebelum pemekaran hingga setelah pemekaran yaitu dengan rata-rata 4,10 sebelum pemekaran menjadi 14,67 setelah pemekaran. Jika dibandingkan, proporsi CAPEXI Kabupaten Solok Selatan lebih tinggi dari daerah induknya dengan rata-rata 30,54. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2006-2007 terjadi peningkatan yaitu 28,966 menjadi 40,96. Pada tahun 2008 sampai 2018 proporsi CAPEXI daerah mekar terjadi penurunan, namun penurunannya tidak terlalu drastis masih diatas CAPEXI daerah induk yaitu 24,90.

Tabel 2 Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Tahun	Kab. Solok sebelum pemekaran					Tahun	Setelah Pemekaran									
							Kab. Solok					Kab. Solok Selatan				
	FIDI	FGII	FCAPEXI	FCEI	IKKPD		FIDI	FGII	FCAPEXI	FCEI	IKKPD	FIDI	FGII	FCAPEXI	FCEI	IKKPD
1991	35,75	0,05	1,75	2,28	17,08	2006	40,81	0,88	16,66	11,26	22,00	50,35	1,51	28,96	17,17	24,32
1992	42,17	0,06	1,58	2,73	15,55	2007	31,74	0,79	11,87	12,91	23,46	43,31	1,13	40,96	16,28	28,77
1993	32,81	0,11	1,66	3,19	18,04	2008	24,41	0,41	11,15	9,91	24,27	27,01	0,55	35,77	18,26	31,89
1994	32,60	0,06	2,09	3,03	18,14	2009	13,46	0,43	10,53	9,54	26,76	27,71	0,74	33,41	18,70	31,29
1995	23,15	0,11	2,56	3,48	20,75	2010	4,40	0,33	8,17	9,57	28,42	23,27	0,30	23,68	12,95	28,42
1996	30,00	0,13	3,53	3,23	19,22	2011	12,50	0,45	13,61	9,32	27,72	17,16	0,53	28,35	14,29	31,50
1997	33,50	0,14	3,12	4,13	18,47	2012	7,42	0,35	18,84	10,29	30,51	19,87	0,71	29,92	15,77	31,63
1998	34,49	0,17	3,17	5,05	18,48	2013	10,30	0,37	16,15	10,51	29,18	21,63	0,65	31,21	15,45	31,42
1999	27,66	0,23	3,42	6,04	20,51	2014	10,34	0,45	16,47	11,35	29,49	21,10	0,83	30,87	15,31	31,48
2000	19,96	0,19	4,01	5,37	22,40	2015	1,34	0,47	17,76	11,85	32,19	25,11	0,76	30,60	16,62	30,72
2001	27,24	0,39	3,27	13,19	22,40	2016	7,19	0,48	18,79	12,12	31,05	24,41	1,24	30,32	17,71	31,21
2002	25,30	0,78	4,57	15,62	23,92	2017	12,07	0,95	16,41	10,41	28,92	23,58	1,51	28,04	16,50	30,62
2003	26,13	0,86	18,52	18,15	27,85	2018	6,53	0,53	14,32	9,12	29,36	21,91	1,14	24,90	14,88	29,75
Rata-rata	30,06	0,25	4,10	6,58	20,22	Rata-rata	14,04	0,53	14,67	10,63	27,95	26,65	0,89	30,54	16,15	30,23

Kontribusi Sektor Pemerintah (FCEI), peran anggaran pemerintah daerah terhadap perekonomian regional tidak saja melalui belanja modal yang bersifat investasi jangka panjang, tetapi juga melalui belanja rutin atau belanja tetap yang lebih bersifat konsumtif. Kontribusi sektor pemerintah Kabupaten Solok sebelum dan sesudah pemekaran relatif stabil yaitu 6,58 sebelum pemekaran sedangkan setelah pemekaran 10,63. Namun jika dibandingkan dengan daerah mekar kontribusi sektor pemerintah lebih tinggi yaitu dengan rata-rata 16,15.

Dari empat indikator keuangan pemerintah daerah yang telah diuraikan di atas digunakan untuk menghitung indeks kinerja keuangan pemerintah daerah (IKPPD). Secara keseluruhan indeks kinerja keuangan pemerintah daerah (IKPPD) Kabupaten Solok meningkat baik sebelum maupun sesudah pemekaran yaitu dengan rata-rata 20,22 sebelum pemekaran dan 27,95 setelah pemekaran. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan kinerja keuangan pemerintah daerah lebih tinggi dari daerah induknya yaitu dengan rata-rata 30,23.

Walaupun dari sebelum pemekaran IKPPD mengalami peningkatan tapi dibandingkan IKKPD Kabupaten Solok Selatan, IKPPD Kabupaten Solok sedikit lebih rendah, jadi dari sisi IKKPD dapat disimpulkan pemekaran daerah berpengaruh negatif terhadap Kabupaten Solok

Analisis Kinerja Pelayanan Publik

Aspek ketiga yang menjadi fokus penelitian ini adalah kinerja pelayanan publik pemerintah daerah. Analisis dibagi dalam tiga bagian yaitu : pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Indikator kinerja pelayanan publik yang dirumuskan dalam penelitian ini akan dititikberatkan kepada sisi input pelayanan publik itu sendiri.

a. Pendidikan

Indikator Jumlah siswa per Sekolah tingkat Dasar dan SMP dan SMA mengandung dua makna krusial. Pertama, ketersediaan sekolah; dan kedua, partisipasi masyarakat. Jika rendahnya indikator ini lebih disebabkan oleh penambahan sekolah yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan siswa, maka permasalahannya adalah kurang sekolah. Solusinya adalah menambah sekolah. Namun jika indikator ini lebih disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan penduduk usia sekolah dasar yang bersekolah dibanding dengan pertumbuhan sekolah, maka permasalahannya adalah partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Untuk indikator pendidikan disusun berdasarkan rasio jumlah siswa persekolah tingkat sekolah dasar, SMP dan SMA beserta rasio jumlah siswa per guru.

Rasio siswa persekolah pada tingkat SD dan SLTP (BEFI) di Kabupaten Solok cenderung konstan baik sebelum pemekaran maupun setelah pemekaran, walaupun terlihat tren penurunan selama tahun 2006-2018. dengan rata-rata 163,43 sebelum pemekaran dan 159,36 setelah pemekaran. Dan sedikit lebih unggul jika dibandingkan dengan BEFI Kabupaten Solok Selatan dengan rata-rata 154,13. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan SD dan SMP Kabupaten Solok memiliki rasio jumlah siswa persekolah yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Solok Selatan. Dari lampiran tabel (BEFI) selama tahun 2006-2018 tampak bahwa peningkatan jumlah siswa SD dan SMP tidak dapat diimbangi oleh pertumbuhan sekolah. Rasio siswa bersekolah pada tingkat SMA (HEFI) di Kabupaten Solok cenderung menurun yaitu rata-rata 296,26 sebelum pemekaran menjadi rata-rata 246,03 sesudah pemekaran. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan rasio siswa bersekolah pada tingkat SMA lebih tinggi dengan rata-rata 275,40. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah sekolah tidak dapat mengimbangi pertumbuhan siswa. Partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya meningkat setiap tahunnya, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah siswa SMA tiap tahunnya.

Jumlah Siswa Per Guru pada SD & SLTP (BETI), Perhitungan rasio siswa per guru mengandung makna bahwa semakin rendah rasio siswa per guru (BETI) maka semakin baik, berarti jumlah siswa yang menjadi tanggungan tiap guru semakin sedikit. Rasio siswa per guru untuk tingkat SD dan SLTP pada Kabupaten Solok terjadi penurunan dari sebelum pemekaran dengan rata-rata 20,62 hingga rata-rata 13,18. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan rasio siswa per guru untuk tingkat SD dan SLTP lebih rendah lagi yaitu dengan rata-rata 11,28. Hal ini menandakan bahwa pelayanan pengajaran lebih optimal dan kualitas pendidikan menjadi lebih baik setelah dilakukannya pemekaran. Rasio siswa per guru untuk tingkat SMA (HETI) pada Kabupaten Solok juga terjadi penurunan secara signifikan dari rata-rata 12,49 sebelum pemekaran hingga rata-rata 9,04 setelah pemekaran. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan, rasio siswa per guru untuk tingkat SMA pada Kabupaten Solok lebih baik. Namun perbedaannya tidak terlalu besar yaitu rata-rata 10,70.

b. Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan diukur dengan jumlah fasilitas kesehatan untuk tiap 10.000 orang penduduk. Ketersediaan fasilitas kesehatan Kabupaten Solok lebih baik dari Kabupaten Solok Selatan. Sebelum pemekaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Solok dengan rata-rata 125 per 10.000 (HFI=1,25) dan terjadi penurunan setelah pemekaran yaitu dengan rata-rata 106 per 10.000 (HFI=1,06). Namun jika dibandingkan dengan daerah Kabupaten Solok Selatan, fasilitas kesehatan Kabupaten Solok lebih baik yaitu dengan rata-rata 52 per 10.000 (HFI=0,52). Pada tahun 2006 fasilitas kesehatan di Kabupaten Solok adalah 101 per 10.000 (HFI=1,01) berbeda dengan Kabupaten Solok Selatan yang berjumlah 37 per 10.000 (HFI=0,37). Angka ini terjadi peningkatan pada tahun 2018 baik daerah Kabupaten Solok maupun Kabupaten Solok Selatan. Fasilitas kesehatan Kabupaten Solok tahun 2018 130 per 10.000 (HFI=1,30) sedangkan Kabupaten Solok Selatan 59 per 10.000 (HFI=0,59). Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya pelayanan kesehatan di kedua kabupaten ini.

Ketersediaan Tenaga Kesehatan (HOI), Evaluasi terhadap ketersediaan tenaga kesehatan menggunakan rasio tenaga kesehatan termasuk dokter, paramedis dan tenaga non paramedis untuk setiap 10.000 penduduk. Perkembangan jumlah tenaga kesehatan pada kedua kabupaten berfluktuasi tetapi cenderung meningkat. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan ini menindikasikan pelayanan kesehatan yang semakin membaik dan ditunjukkan juga oleh HOI yang semakin meningkat.

Pada sebelum pemekaran HOI Kabupaten Solok dengan rata-rata 6,51 dan terjadi sedikit peningkatan setelah pemekaran dengan rata-rata sebesar 6,75. Pada tahun 2006 HOI di daerah Kabupaten Solok lebih baik dari Kabupaten Solok Selatan 4,8 dibandingkan 1,66 dan terjadi peningkatan tiap tahunnya di kedua kabupaten. Secara umum rasio tenaga kesehatan per 10.000 penduduk (HOI) di Kabupaten Solok lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan.

c. Infrastruktur

Ketersediaan pelayanan infrastruktur (IQI) juga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan daerah. Indikator yang digunakan untuk mempresentasikan kualitas infrastruktur adalah persentase jalan dalam kondisi baik terhadap total panjang ruas jalan. Kualitas jalan di Kabupaten Solok dari sebelum pemekaran hingga setelah pemekaran mengalami peningkatan. Dimana peningkatan tersebut dari dengan rata-rata 24,06 sebelum pemekaran menjadi 36,63 setelah pemekaran. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan, kualitas jalan pada Kabupaten Solok lebih baik. Kualitas jalan Kabupaten Solok Selatan dengan rata-rata 16,13. Walaupun kualitas jalan Solok Selatan lebih rendah dari Kabupaten Solok, namun terjadi peningkatan kualitas jalan tiap tahunnya. Dari ruas jalan keseluruhan, Kabupaten Solok Selatan memiliki ruas jalan yang lebih panjang, tetapi dari kualitas jalan yang baik daerah Kabupaten Solok memang lebih unggul. Pemekaran memang membawa perbaikan dan pembangunan ruas jalan.

Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan. Pembangunan fasilitas publik seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan itu sendiri, sehingga dapat secara optimal mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah

Secara keseluruhan nilai rata-rata Indeks Kinerja Pelayanan Publik (IKPP) Kabupaten Solok sepanjang tahun 2006-2018 sedikit lebih rendah dari Kabupaten Solok Selatan. Tetapi

perbedaan nilai rata-rata tidak terlalu jauh yaitu 89,66 Kabupaten Solok sedangkan 89,75 Kabupaten Solok Selatan. Ini berarti pelayanan publik di kabupaten Solok Selatan (daerah mekar) sedikit lebih baik dibandingkan dengan daerah Kabupaten Solok (daerah induk).

Tabel 3 Indeks Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Tahun	Kab. Solok sebelum pemekaran								Tahun	Setelah Pemekaran															
										Kab. Solok							Kab. Solok Selatan								
	BEFI	HEFI	BETI	HETI	HFI	HOI	IQI	IKPP		BEFI	HEFI	BETI	HETI	HFI	HOI	IQI	IKPP	BEFI	HEFI	BETI	HETI	HFI	HOI	IQI	IKPP
1991	172,86	318,06	20,92	10,68	1,09	4,80	27,29	98,93	2006	161,90	232,19	15,55	9,58	1,01	6,18	31,75	86,84	168,74	216,22	16,35	12,09	0,37	1,66	7,67	80,89
1992	171,48	321,67	21,03	11,11	1,16	4,93	27,25	99,19	2007	166,52	239,08	14,13	9,65	1,07	8,03	42,24	90,45	168,46	243,78	12,26	9,67	0,37	2,00	7,67	85,77
1993	176,26	337,33	21,38	11,08	1,21	5,67	32,99	103,00	2008	168,31	251,03	13,35	9,74	1,07	6,32	34,99	91,23	173,58	290,67	13,74	12,08	0,46	2,89	12,43	93,46
1994	178,48	352,06	21,79	11,38	1,22	6,43	31,80	105,26	2009	165,61	293,78	14,57	9,89	1,01	8,23	39,30	97,64	161,97	203,63	10,84	11,31	0,47	3,44	12,43	79,97
1995	178,11	329,63	21,37	10,27	1,24	6,82	27,69	101,69	2010	165,11	248,98	13,33	9,25	1,03	8,29	38,20	91,29	173,78	261,75	11,10	8,61	0,48	5,43	13,02	90,68
1996	176,03	362,47	21,60	10,66	1,28	7,19	28,10	106,11	2011	169,93	253,07	13,54	9,86	1,05	8,11	36,09	92,12	152,96	278,50	10,73	9,52	0,52	5,13	13,91	90,11
1997	174,80	375,19	22,21	13,54	1,26	7,33	19,56	106,06	2012	159,78	242,42	11,57	7,50	1,05	7,08	40,24	90,21	149,23	291,70	9,21	8,80	0,57	5,72	15,96	92,17
1998	156,74	219,24	21,28	12,10	1,28	7,46	17,26	81,23	2013	159,78	234,82	11,56	7,82	1,05	5,28	30,08	87,37	135,53	294,14	8,36	9,64	0,57	4,41	23,44	91,44
1999	153,11	243,46	21,91	14,20	1,28	6,92	23,07	84,53	2014	161,67	249,84	11,79	8,33	1,05	5,28	37,99	90,82	155,13	311,59	9,89	9,30	0,57	4,46	24,57	96,73
2000	149,62	233,28	20,01	13,61	1,28	6,60	23,14	82,90	2015	161,45	224,25	13,78	7,94	1,06	6,34	37,99	87,05	143,07	291,88	11,16	9,02	0,57	4,46	20,10	91,41
2001	144,24	252,44	19,53	14,45	1,29	6,62	15,47	83,73	2016	153,09	216,06	12,67	8,00	1,06	6,34	23,28	82,74	142,47	287,56	10,25	8,10	0,58	3,34	20,10	90,81
2002	148,23	241,53	18,28	12,42	1,30	7,01	17,19	83,51	2017	135,65	251,53	11,87	9,54	1,15	6,04	49,80	88,97	140,41	298,78	10,96	11,61	0,59	4,22	19,19	91,52
2003	144,68	264,98	16,77	16,81	1,30	6,88	21,97	86,60	2018	142,90	261,38	13,67	10,43	1,16	6,20	34,29	88,83	138,34	310,00	11,81	19,38	0,59	5,62	19,19	91,79
Rata-rata	163,43	296,26	20,62	12,49	1,25	6,51	24,06	94,06	Rata-rata	159,36	246,03	13,18	9,04	1,06	6,75	36,63	89,66	154,13	275,40	11,28	10,70	0,52	4,06	16,13	89,75

Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Salah satu motor penggerak pelayanan publik adalah aparatur pemerintah daerah dalam jumlah maupun kualitasnya sangat menentukan arah pembangunan di daerah. Kualitas dan produktifitas aparatur menjadi sangat penting, mengukur produktifitas aparatur tidaklah mudah. Karena itu disamping melihat jumlah, penelitian ini juga melihat kualitas yang ditinjau dari tingkat pendidikan dan karakteristik fungsionalnya. Khususnya untuk karakteristik fungsional kelompok guru dan tenaga kesehatannya yang akan dilihat khusus karena kedua mencerminkan potensi peningkatan mutu modal manusia.

Kualitas Pendidikan Aparatur (EQI), Pendidikan aparatur menggambarkan kualitas aparatur yang pada akhirnya berpengaruh pada perbaikan maupun pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Apabila jumlah aparatur berpendidikan sarjana meningkat, maka semakin baik kualitas aparatur. Jumlah aparatur Kabupaten Solok yang berpendidikan minimal sarjana tiap tahunnya selalu ada peningkatan. Sebelum pemekaran jumlah aparatur yang berpendidikan minimal sarjana dengan rata-rata 13 sedangkan setelah pemekaran terjadi peningkatan lebih dari 3 kali lipat yaitu dengan rata-rata 48,3. Hal ini menandakan adanya peningkatan kualitas aparatur di Kabupaten Solok. Pada tahun 2006-2018 jumlah pendidikan aparatur minimal sarjana di Kabupaten Solok cenderung meningkat yaitu dari 2.068 orang pada tahun 2006 menjadi 3.956 orang pada tahun 2018 yang berarti meningkat sebesar 1.888 orang atau 91,3%. Pada periode yang sama juga terjadi peningkatan yang pesat di daerah Solok

Selatan dari 232 orang pada tahun 2006 menjadi 644 orang pada tahun 2018 yang berarti meningkat sebesar 412 orang atau 177,8%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Solok, jumlah aparatur yang berpendidikan minimal sarjana lebih unggul dari Kabupaten Solok Selatan.

Jumlah Aparatur Pendidikan (EPI), Persentase aparatur pendidik di Kabupaten Solok mengalami peningkatan dari sebelum pemekaran dengan rata-rata 73,5 persen menjadi 79,25 persen setelah pemekaran. Peningkatan ini terjadi adanya kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang memberi prioritas pengangkatan aparatur bidang pendidikan dan kesehatan. Namun jika dibandingkan dengan daerah Kabupaten Solok Selatan persentase aparatur pendidik Kabupaten Solok lebih tinggi. Persentase aparatur pendidik Kabupaten Solok Selatan dengan rata-rata 75,50%.

Dari data yang ada, terlihat jumlah aparatur pendidik di Kabupaten Solok hampir sama banyak dari jumlah aparatur PNS keseluruhan sehingga persentase aparatur pendidik di Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan di atas 75%. Hal ini dikarenakan aparatur pendidik tidak hanya yang sudah PNS saja tetapi juga termasuk aparatur pendidik honorer sehingga hampir menyamai jumlah aparatur PNS keseluruhan. Dari jumlah realnya, jumlah aparatur pendidik di Kabupaten Solok cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu sebanyak 6.240 orang pada tahun 2006 menjadi 7.977 orang pada tahun 2016. Tapi kalau dilihat dari persentasenya, jumlah aparatur pendidik cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh jumlah aparatur keseluruhan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga persentase kenaikannya ada yang tinggi dan ada pula yang sedikit.

Persentase Aparatur Paramedis (PPI), jumlah tenaga kesehatan Kabupaten Solok sebelum pemekaran lebih tinggi dibandingkan setelah pemekaran yaitu dengan rata-rata 10,03% sebelum pemekaran menjadi 9,82% setelah pemekaran. Pada tahun 2006 jumlah tenaga kesehatan di daerah Kabupaten Solok lebih banyak dari Kabupaten Solok Selatan yaitu 618 orang Kabupaten Solok dibandingkan 166 orang Kabupaten Solok Selatan. PPI pada daerah Kabupaten Solok Selatan lebih rendah dari daerah Kabupaten Solok, yang berarti pelayanan kesehatan di daerah induk lebih baik dari pada daerah mekar. Pada Kabupaten Solok meningkat dari 568 orang menjadi 740 orang atau bertambah sebanyak 172 orang atau 30%, sedangkan Kabupaten Solok Selatan meningkat lebih banyak dari 164 orang tahun 2005 menjadi 334 orang tahun 2016 atau 104%. Namun dilihat dari persentase PPI, Kabupaten Solok sedikit lebih rendah dari Kabupaten Solok Selatan yaitu 9,82 dibandingkan dengan 10,03.

Secara keseluruhan Indeks Kinerja Aparatur (IKA) daerah Kabupaten Solok meningkat dari sebelum pemekaran dengan rata-rata 32,18% menjadi sesudah pemekaran yaitu dengan rata-rata 45,7. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok lebih tinggi yaitu dengan rata-rata 32,69%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas aparatur Kabupaten Solok lebih unggul dari Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 4 Indeks Kinerja Aparatur Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Tahun	Kab. Solok Sebelum Pemekaran				Tahun	Setelah Pemekaran							
						Kab. Solok				Kab. Solok Selatan			
	EQI	EFI	PPI	IKA		EQI	EFI	PPI	IKA	EQI	EFI	PPI	IKA
1991	17,01	66,04	6,96	30,00	2006	33,14	77,05	9,90	40,03	9,93	75,61	7,10	30,88
1992	17,15	67,50	7,20	30,62	2007	33,58	77,49	11,56	40,88	9,17	79,35	6,60	31,71
1993	17,28	68,99	8,35	31,54	2008	35,35	85,30	9,38	43,34	10,29	76,76	9,85	32,30
1994	8,83	69,92	9,64	29,46	2009	35,34	81,12	12,22	42,89	10,07	77,88	10,31	32,75
1995	10,53	73,62	10,42	31,53	2010	42,13	81,38	11,46	44,99	11,97	75,47	12,97	33,47
1996	10,81	74,80	11,30	32,30	2011	41,87	80,88	11,14	44,63	12,06	75,35	12,32	33,25
1997	11,26	74,39	11,93	32,53	2012	41,26	88,00	9,00	46,09	12,64	76,88	12,34	33,95
1998	11,13	75,27	11,92	32,77	2013	51,27	89,70	6,90	49,29	12,91	77,37	9,63	33,30
1999	12,03	74,93	11,45	32,80	2014	58,03	88,24	6,82	51,03	14,22	73,90	9,14	32,42
2000	12,45	74,80	10,26	32,50	2015	57,96	78,53	8,16	48,22	16,12	71,99	10,24	32,78
2001	14,93	74,17	10,24	33,11	2016	51,70	78,26	9,28	46,41	14,42	73,83	7,16	31,80
2002	16,14	80,99	10,78	35,97	2017	71,51	61,55	10,69	47,91	14,05	73,64	9,61	32,44
2003	9,45	80,11	9,97	33,18	2018	71,24	62,70	11,17	48,37	15,02	73,50	13,11	33,87
Rata-rata	13,00	73,50	10,03	32,18	Rata-rata	48,03	79,25	9,82	45,70	12,53	75,50	10,03	32,69

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara keseluruhan Indikator Kinerja Ekonomi (IKE), Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD), Indikator Kinerja Pelayanan Publik (IKPD) dan Indikator Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (IKA) Kabupaten Solok setelah pemekaran lebih tinggi daripada sebelum pemekaran. Jadi bisa dikatakan pemekaran memberikan dampak positif terhadap Kabupaten Solok. Tapi jika dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok hanya lebih unggul di sisi Indikator Kinerja Ekonomi (IKE) dan Indeks Kinerja Aparatur (IKA). Sedangkan dari sisi Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD), Indikator Kinerja Pelayanan Publik (IKPD) Kabupaten Solok Selatan lebih unggul dari Kabupaten Solok

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar ada upaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi meliputi : Pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan PDRB per-kapita. Pengurangan angka kemiskinan memerlukan perbaikan kebutuhan dasar terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk meningkatkan PDRB secara khusus diperlukan peningkatan investasi yang lebih besar baik dari pemerintah maupun swasta. Investasi pemerintah meliputi pembangunan infrastruktur dan memberikan kemudahan dalam perizinan. Peningkatan potensi daerah di Kabupaten Solok serta Peningkatan Porsi Belanja Langsung di Kabupaten Solok untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong peningkatan pembangunan serta upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah terutama dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas aparatur baik melalui pendidikan dan

pelatihan. Selain itu diperlukan perbaikan manajemen pemerintahan daerah termasuk dalam bidang pengawasan.

E. REFERENSI

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Adisasmita. H.R. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta: Graha Ilmu
- Adrimas (2012). *Perencanaan Pembangunan Ekonomi*. Padang: Andalas University Press.
- Adrimas, A. A. (2017). *Analisis Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Perkembangan Perekonomian dan Kinerja Pemerintah Daerah Induk Kabupaten Pasaman* [Tesis]. Padang. Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas.
- Adrimas, Rivai, H. A, & Yulius, Y (2017). *Analisa Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan Perekonomian dan Kinerja Pemerintah Daerah di Sumatera Barat: Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat*. 2017. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- Afriani, I., Saleh, A. K., & Fatah, S. (2013) *Dampak Pemekaran Kabupaten Tanah Toraja Terhadap Kinerja Perekonomian, Keuangan, Pelayanan Publik dan Aparatur Pemerintah Daerah*. Jurnal Pacasarjana Universitas Hasanudin
- Agusniar, A. 2006. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Singkil* [tesis]. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Arsyad, Lincolin (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi daerah*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bappenas (2008). *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*. Laporan Penelitian. Direktorat Otda Bappenas. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (1992). *Kabupaten Solok Dalam Angka 1992*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (1993). *Kabupaten Solok Dalam Angka 1993*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (1994). *Kabupaten Solok Dalam Angka 1994*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (1995). *Kabupaten Solok Dalam Angka 1995*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (1996). *Kabupaten Solok Dalam Angka 1996*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (1997). *Kabupaten Solok Dalam Angka 1997*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (1998). *Kabupaten Solok Dalam Angka 1998*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (1999). *Kabupaten Solok Dalam Angka 1999*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2000). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2000*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2001). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2001*. Solok. BPS Kab. Solok

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2002). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2002*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2005). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2005*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2006). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2006*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2007). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2007*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2008). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2008*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2009). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2009*. Solok. BPS Kab. Solok
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2010). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2010*. Solok. BPS Kab. Solok.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2011). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2011*. Solok. BPS Kab. Solok.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2012). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2012*. Solok. BPS Kab. Solok.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2013). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2013*. Solok. BPS Kab. Solok.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2014). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2014*. Solok. BPS Kab. Solok.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2015). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2015*. Solok. BPS Kab. Solok.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2016). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2016*. Solok. BPS Kab. Solok.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2017). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2017*. Solok. BPS Kab. Solok.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2018). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2018*. Solok. BPS Kab. Solok.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2019). *Kabupaten Solok Dalam Angka 2019*. Solok. BPS Kab. Solok.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2005). *Solok Selatan Dalam Angka 2005*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2006). *Solok Selatan Dalam Angka 2006*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2007). *Solok Selatan Dalam Angka 2007*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2008). *Solok Selatan Dalam Angka 2008*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2009). *Solok Selatan Dalam Angka 2009*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2010). *Solok Selatan Dalam Angka 2010*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2011). *Solok Selatan Dalam Angka 2011*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2012). *Solok Selatan Dalam Angka 2012*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2013). *Solok Selatan Dalam Angka 2013*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2014). *Solok Selatan Dalam Angka 2014*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2015). *Solok Selatan Dalam Angka 2015*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2016). *Solok Selatan Dalam Angka 2016*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2017). *Solok Selatan Dalam Angka 2017*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2019). *Solok Selatan Dalam Angka 2018*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (2010). *Solok Selatan Dalam Angka 2019*. Padang Aro. BPS Kab. Solok Selatan
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2017). *Sumatera Barat Dalam Angka 2017*. Padang. BPS Prov. Sumbar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2018). *Sumatera Barat Dalam Angka 2018*. Padang. BPS Prov. Sumbar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2019). *Sumatera Barat Dalam Angka 2019*. Padang. BPS Prov. Sumbar.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri (2005), Sinopsis Penelitian : *Efektifitas Pemekaran Wilayah di Era Otonomi Daerah*. Pusat Litbang Otonomi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Desilvia, Nike (2016). *Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Kata Sungai Penuh* [Tesis]. Padang, Unand
- Fitriani, Fitria, Hofinan Bert and Kai Kaser (2005). *Unity in Diversity ? The Creation of New Local Government in a Decentralising Indonesia*. Bulletin of Indonesia Studies.
- Hanif, Nurcholis (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Ida, Laode (2005). *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*. Jakarta : Media Indonesia.
- Isman. A. (2017). *Analisis Pengaruh Kinerja Ekonomi, Keuangan Daerah, Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur terhadap Keberhasilan Pemekaran Daerah Pasaman Barat* [Tesis]. Padang. Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas.
- Jhingan, M L. (2008). *ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan. Kebijakan*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN
- Lembaga Administrasi Negara (2005) *Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah periode, 1999-2003*. Jakarta. Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah

- Lumbessy, K. 2005. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan Perekonomian Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buru* [tesis]. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Pamudji (2000), *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Pidie, Andi Mustari (1999). *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad. XXI!*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021
- Riani, Ida Ayu Purba dan M. PudjihaJho (2012). *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan dan Ketimpangan Antarwilayah di Provinsi Papua*. Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 No. 1
- Safi'i, H. M (2007). *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Sukirno, Sadono. (1985). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPEF-UI Bima Grafika.
- Saragih, Juli Panglima, (2003). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak, & Bambang Brodjonegoro. (2002). *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Simanjuntak, Robert. (2002). *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: A One Day Conference*. LPEM-UI. Jakarta.
- Sirojuzilam (2008) *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan. Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Di Sumatera Utara*. Pustaka Bangsa.
- Sjafrizal (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanti (2014). *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Utara*. JEP-Vol. 3, NO 2.
- Tarigan, R. (2006). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Penemuan. Empiris*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michel, 2012. *Pembangunan ekonomi didunia ketiga edisi ke tujuh*. Jakarta: Balai Aksara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.